



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)

## PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

# 2023

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA  
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

# DAFTAR ISI

1. Maklumat Pelayanan Publik
2. Maklumat Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik
3. Layanan Bimbingan Penelitian secara online dan offline
4. Layanan Bimbingan Magang
5. Layanan Konsultasi
6. Layanan Publik Puslitka
7. Layanan tanya jawab di Website Mahkamah Konstitusi
8. Layanan Katalog Online
9. Layanan Kunjungan Puskon
10. Layanan Bimbingan Perpustakaan
11. Layanan Ruang Diskusi Perpustakaan
12. Layanan Digital Perpustakaan
13. Layanan Referensi Hukum

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGAJIAN PERKARA  
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

## **MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**

**KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR  
YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.**

**MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN  
MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.**

**BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI  
APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.**

**JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

**M. GUNTUR HAMZAH**





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

# **MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.**

**JAKARTA, 20 JULI 2020  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

**M. GUNTUR HAMZAH**



*Digital Signature*  
*mk-1187691964201114103355*

View



Reza Winata



Partic



Reza Winata (H



NB\_Much. Nand



Shofi M. Effend



NB\_Much. Nanditama

Security

Participants 3

Chat

Share Screen

Reactions

Apps

More

End

Invite

search





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Area Manajemen SDM  
Aparatur

## SURAT TUGAS Nomor : 14/2500/03/2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua Program Studi FH Universitas Pamulang Nomor : 818/CII/KM/UNPAM/II/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Permohonan Penelitian untuk Tugas Akhir, perlu menugaskan peneliti dalam kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut diatas perlu menerbitkan surat Oktugas kepada pegawai yang namanya tersebut dibawah ini.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### Memberi Tugas

Kepada :

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Alboin Pasaribu, S.H.,M.H.	198909062014021001	Peneliti Ahli Muda

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai pembimbing Mahasiswa Penelitian untuk Tugas Akhir Mahasiswa FH Universitas Pamulang atas nama Rajib pada :  
Hari / Tanggal : Jumat, 4 Maret 2022 s.d. selesai  
Tempat : Daring Zoom Meeting
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada atasannya.

Jakarta, 04 Maret 2022  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian  
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan,  
**Kurniasih Panti Rahayu**



Digital Signature  
mk1455438071220304114636



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Area Manajemen SDM  
Aparatur

## SURAT TUGAS Nomor : 14/2500/03/2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua Program Studi FH Universitas Pamulang Nomor : 818/CII/KM/UNPAM/II/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Permohonan Penelitian untuk Tugas Akhir, perlu menugaskan peneliti dalam kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut diatas perlu menerbitkan surat Oktugas kepada pegawai yang namanya tersebut dibawah ini.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### Memberi Tugas

Kepada :

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Alboin Pasaribu, S.H.,M.H.	198909062014021001	Peneliti Ahli Muda

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai pembimbing Mahasiswa Penelitian untuk Tugas Akhir Mahasiswa FH Universitas Pamulang atas nama Rajib pada :  
Hari / Tanggal : Jumat, 4 Maret 2022 s.d. selesai  
Tempat : Daring Zoom Meeting
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada atasannya.

Jakarta, 04 Maret 2022  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian  
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan,  
**Kurniasih Panti Rahayu**



Digital Signature  
mk1455438071220304114636



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Area Manajemen SDM  
Aparatur

## SURAT TUGAS Nomor : 22/2500/04/2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat PIh. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan FH Universitas Hasanuddin Nomor : 2620/UN4.5.3/PT.00/2022 tanggal 18 Maret 2022 perihal Penelitian, perlu menugaskan peneliti dalam kegiatan dimaksud;  
b. bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut diatas perlu menerbitkan surat tugas kepada pegawai yang namanya tersebut dibawah ini.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;  
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### Memberi Tugas

Kepada :

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	19850906 201402 2 001	Peneliti Ahli Muda

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai pembimbing Mahasiswa Penelitian FH Universitas Hasanuddin atas nama Sonia Sekar Sari pada :  
Hari / Tanggal : Rabu, 6 April 2022 s.d. selesai  
Tempat : Daring Zoom Meeting  
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada atasannya.

Jakarta, 05 April 2022

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian  
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan,  
**Kurniasih Panti Rahayu**



Digital Signature  
mk113383191220405104704



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Area Manajemen SDM  
Aparatur

## SURAT TUGAS Nomor : 19/2500/03/2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang Nomor : 008/B.02.01/PSHPD/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 perihal Permohonan data penelitian Disertasi, perlu menugaskan peneliti dalam kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut diatas perlu menerbitkan surat Oktugas kepada pegawai yang namanya tersebut dibawah ini.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### Memberi Tugas

Kepada :

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H.	19781102 200901 2 002	Peneliti Ahli Muda

Untuk :

1. Melaksanakan tugas sebagai pembimbing penelitian Disertasi Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang atas nama Arista Candra Irawati pada :
- Hari / Tanggal : Selasa, 19 Maret 2022 s.d. selesai  
Pukul : 13.00 WIB s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Melalui Zoom Meeting
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada atasannya.

Jakarta, 28 Maret 2022  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian  
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan ,

**Kurniasih Panti Rahayu**



Digital Signature  
mk948548562220328034634



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Area Manajemen SDM Aparatur

## SURAT TUGAS Nomor : 449/2000/11/2021

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat dari Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Nomor : 1806/SPs/Unpak/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian, perlu menugaskan peneliti dalam kegiatan dimaksud;
- b. Bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut diatas perlu menerbitkan surat tugas kepada pegawai yang namanya tersebut dibawah ini.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

### Memberi Tugas

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Bisariyadi, S.H. , LL.M.	19790103200604100 3	Peneliti Ahli Madya

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai pembimbing penelitian mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan atas nama Firdaus Bangun (NPM : 072320023) pada :
- Tanggal : Jumat, 5 November 2021 s.d. selesai  
Tempat : Zoom Meeting
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada atasannya.

Jakarta, 04 November 2021  
Sekretaris Jenderal,  
**M. Guntur Hamzah**



Digital Signature  
mk-1753829181211104014457



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Area Manajemen SDM  
Aparatur

## SURAT TUGAS Nomor : 30/2500/06/2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua Program Studi FH Universitas Pamulang Nomor : 1316/C.II/KM/UNPAM/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 perihal Permohonan Penelitian untuk Tugas Akhir, perlu menugaskan peneliti dalam kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut diatas perlu menerbitkan surat tugas kepada pegawai yang namanya tersebut dibawah ini.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### Memberi Tugas

Kepada :

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Erlina Maria Christin Sinaga, S.H., M.H.	19920906 201801 2 003	Peneliti Ahli Muda

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai pembimbing Mahasiswa Penelitian untuk Tugas Akhir Mahasiswa FH Universitas Pamulang atas nama Dyah Puspita Dewi pada :
- Hari / Tanggal : Senin, 6 Juni 2022 s.d. selesai  
Tempat : Daring Zoom Meeting
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada atasannya.

Jakarta, 04 Juni 2022  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian  
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan,  
**Kurniasih Panti Rahayu**



Digital Signature  
mk-161940384220603015523



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Area Manajemen SDM  
Aparatur

## SURAT TUGAS Nomor : 18/2500/03/2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua BP2M FISIP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya tanggal 1 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian dan Pengambilan Data, perlu menugaskan peneliti dalam kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut diatas perlu menerbitkan surat Oktugas kepada pegawai yang namanya tersebut dibawah ini.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### Memberi Tugas

Kepada :

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.	197512312006041009	Peneliti Ahli Muda

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai pembimbing penelitian Mahasiswa dengan tema "Kerja Sama Bantuan Luar Negeri dalam Tata Kelola Sektor Air dan Sanitasi di Indonesia: Studi Kasus Jawa Barat" FISIP Universitas Brawijaya atas nama Dewa Ayu Putu Eva Wishanti pada :  
Hari / Tanggal : Kamis, 24 Maret 2022 s.d. selesai  
Tempat : Daring Zoom Meeting
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada atasannya.

Jakarta, 23 Maret 2022

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian  
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan,  
**Kurniasih Panti Rahayu**



Digital Signature  
mk374471004220323110201



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Area Manajemen SDM  
Aparatur

## SURAT TUGAS Nomor : 35/2500/06/2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Nomor : 013-00/Dir/PPS-UPDM/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian Survey, perlu menugaskan peneliti dalam kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut diatas perlu menerbitkan surat tugas kepada pegawai yang namanya tersebut dibawah ini.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### Memberi Tugas

Kepada :

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.	19751231 200604 1 009	Peneliti Ahli Muda

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai pembimbing Mahasiswa Penelitian untuk Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) atas nama Irvan Afrialdi pada :  
Hari / Tanggal : Rabu, 16 Juni 2022 s.d. selesai  
Tempat : Daring Zoom Meeting
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada atasannya.

Jakarta, 14 Juni 2022

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian  
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan,  
**Kurniasih Panti Rahayu**



Digital Signature  
mk-608354645220614082438



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Area Manajemen SDM  
Aparatur

## SURAT TUGAS Nomor : 60/2500/10/2021

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Dekan FSyariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : B-768.15/Un.02/TS/PP.05.3/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Permohonan Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa, perlu menugaskan peneliti untuk kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut diatas perlu menerbitkan surat tugas kepada pegawai yang namanya tersebut dibawah ini.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### Memberi Tugas

Kepada :

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	19821130 200604 1 003	Peneliti Ahli Muda

- Untuk :
1. Melaksanakan tugas menjadi pembimbing Permohonan Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas nama Moh Durrul Ainun Nafis pada :
- Hari/Tanggal : Senin, 25 Oktober 2021  
Pukul : 08.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Via Zoom Meeting
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada atasannya.

Jakarta, 22 Oktober 2021  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian  
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan,  
**Kurniasih Panti Rahayu**



Digital Signature  
mk-1939292162211022102218



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Area Manajemen SDM  
Aparatur

## SURAT TUGAS Nomor : 16/2500/03/2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua Program Studi FH Universitas Pamulang Nomor : 875/CII/KM/UNPAM/III/2022 tanggal 5 Maret 2022 perihal Permohonan Penelitian untuk Tugas Akhir, perlu menugaskan peneliti dalam kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut diatas perlu menerbitkan surat Oktugas kepada pegawai yang namanya tersebut dibawah ini.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### Memberi Tugas

Kepada :

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	198210242009011002	Peneliti Ahli Muda

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai pembimbing Mahasiswa Penelitian untuk Tugas Akhir Mahasiswa FH Universitas Pamulang atas nama Agus Joko Lelono pada :
- Hari / Tanggal : Kamis, 10 Maret 2022 s.d. selesai  
Tempat : Daring Zoom Meeting
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada atasannya.

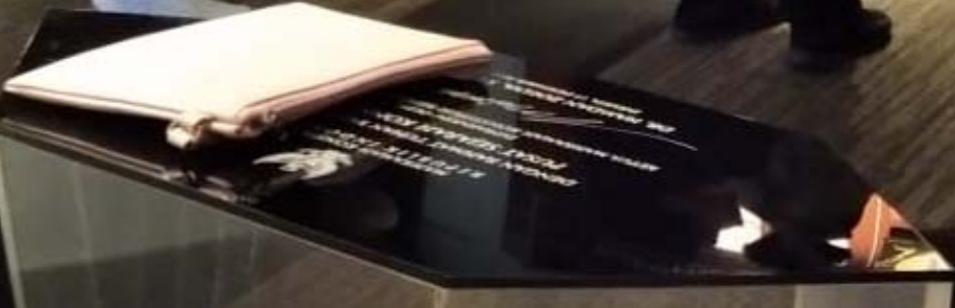
Jakarta, 08 Maret 2022  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian  
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan,  
**Kurniasih Panti Rahayu**



Digital Signature  
mk-689762108220308034223



Perhimpunan Menuju Persatuan Bangsa



SAH KONSTITUSI



DIRGAHAY



Meeting participants seated around a conference table. Visible items include laptops, water bottles, and a sound mixer in the foreground.



**UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**  
**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM**  
**PERINGKAT AKREDITASI B**

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
No. 4898/SK/BAN-PT/AKRED/M/XII/2017 Tanggal 19 Desember 2017  
Kampus UNKRIS Jatiwaringin, Telp. (021) 8487447 ; Fax. (021) 8487447 P.O. Box : 7774/Jat.CM-  
Jakarta 13077 Home page : <http://www.mh-unkris.com> E-mail : [magisterhukumunkris@gmail.com](mailto:magisterhukumunkris@gmail.com)

Nomor : 45/Sekrt/PS-IH/UK/IV/2022  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Data / Research.-**

Jakarta, 5 April 2022

**Kepada Yth :**  
**Yuni Sandrawati**  
**Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi**  
**Indonesia**  
**di-**  
**Mahkamah Konstitusi Indonesia**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Indonesia, Jakarta 10110**

Dengan hormat,

Dengan ini Ketua Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta menerangkan bahwa :

N a m a : SYARIF HIDAYATULLAH NASUTION  
N I M : 2018022017 (HP. 0812 -0515 -0749).  
Program Studi : Ilmu Hukum

Adalah benar Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum UNKRIS yang saat ini sedang memulai penyusunan Tesis sebagai Tugas Akhir.

Untuk hal tersebut di atas yang bersangkutan memerlukan data terkait penelitian tentang perkara Constitutional Complain di Mahkamah Konstitusi yang dengan judul tesis yang sedang disusun. Kami mohon kiranya Ibu berkenan memberikan data yang diperlukan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami

**Ketua PPs Magister Ilmu Hukum UNKRIS,**



**Dr. Siswanti Pratiwi, S.H.,M.M.,M.H.**  
NIDN : 0309106201

cc. Arsip.-



# BERITA



**PENINGKATAN PEMAHAMAN  
HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
BAGI GURU PENGGERAK ANGKATAN II  
CISARUA, 28 S.D. 31 MARET 2022**



08.30.06



**PAN MOHAMAD FAIZ, PH.D.**  
Narasumber



**SANTHY KUSTRIHARDIANI**  
Moderator



Lembaga




**MK Bukan Lembaga di Menara Gading**



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Area Manajemen SDM  
Aparatur

## SURAT TUGAS Nomor : 139/2000/04/2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : B/7703/PW.11.01/4/2022 tanggal April 2022 perihal Undangn narasumber untuk mendapatkan masukan dan diskusi dengan tema “Konstitusionalitas Putusan Peradilan Etik”, perlu menugaskan peneliti dalam kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut diatas perlu menerbitkan surat tugas kepada pegawai yang namanya tersebut dibawah ini.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### Memberi Tugas

Kepada :

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	19821224 200604 1 005	Peneliti Ahli Madya

Untuk :

1. Melaksanakan tugas sebagai narasumber dalam kegiatan paket meeting untuk mendapatkan masukan dan diskusi dengan tema “Konstitusionalitas Putusan Peradilan Etik” yang akan diselenggarakan pada :  
Hari / Tanggal : Senin sd Rabu, 11 sd 13 April 2022  
Tempat : Wisma DPR RI Griya Sabha Kopo, Bogor  
Jawa Barat
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada atasannya.

Jakarta, 11 April 2022  
Sekretaris Jenderal,  
**M. Guntur Hamzah**



## Layanan Publik Perpustakaan MK

### 1. Standar Layanan Referensi Perpustakaan

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi Pegawai MK:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu pegawai MK</li> <li>b. Kartu identitas lainnya</li> <li>c. Mengisi formulir keanggotaan perpustakaan via online</li> </ol> </li> <li>2. Bagi Masyarakat Umum               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu identitas (KTP/Kartu Mahasiswa)</li> <li>b. Mengisi data Buku Tamu di Resepsionis</li> </ol> </li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemustaka mengisi data diri di Buku Tamu Perpustakaan</li> <li>2. Pemustaka menitipkan barang bawaan di rak penitipan barang</li> <li>3. Pemustaka dapat bertanya kepada pustakawan dalam mencari bahan referensi yang dibutuhkan</li> <li>4. Pemustaka dapat langsung mencari bahan referensi kedalam mesin pencarian/katalog perpustakaan atau didampingi pustakawan</li> <li>5. Pemustaka didampingi pustakawan mencari bahan referensi pada rak koleksi perpustakaan</li> <li>6. Pemustaka didampingi pustakawan mencari bahan referensi pada fasilitas buku elektronik yang tersedia di perpustakaan</li> <li>7. Pemustaka mendapatkan bahan referensi yang dibutuhkan</li> <li>8. Apabila bahan referensi yang dibutuhkan tidak tersedia, pustakawan membantu mencatat dan mencari di perpustakaan lain dan akan menghubungi pemustaka kembali setelah referensi didapatkan.</li> </ol>
3.	Jangka Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paling lambat 15 (lima belas) menit untuk bahan referensi yang telah tersedia</li> <li>2. Paling lama 5 (lima) hari kerja untuk bahan referensi yang tidak tersedia di perpustakaan MK dan tersedia di perpustakaan lain</li> </ol>
4.	Biaya Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Cetak terkait hukum dan ketatanegaraan</li> <li>2. Buku Cetak terkait Perkara konstitusi</li> <li>3. Buku Digital/eBook terkait hukum dan ketatanegaraan</li> <li>4. Terbitan MK dalam bentuk Cetak dan digital</li> <li>5. Buku Digital produk/terbitan MK</li> <li>6. Jurnal terkait hukum dan konstitusi</li> <li>7. Tesis dan disertasi internal MK</li> <li>8. Laporan hasil penelitian</li> <li>9. Laporan praktik kerja lapangan dan Magang di MK</li> </ol>
6.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja layanan</li> <li>2. Kiosk Buku Tamu</li> <li>3. Komputer kerja pustakawan</li> <li>4. Komputer Sirkulasi</li> <li>5. Komputer penelusuran informasi/katalog</li> <li>6. Komputer Pemustaka</li> <li>7. Scanner</li> <li>8. Proyektor</li> <li>9. Printer</li> <li>10. Ipad untuk layanan koleksi digital</li> <li>11. Koleksi perpustakaan</li> <li>12. Rak koleksi perpustakaan</li> <li>13. Meja dan Kursi</li> <li>14. Ruang Baca</li> <li>15. Ruang Diskusi</li> <li>16. Ruang Rapat</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>17. Ruang Tandon</li> <li>18. Gerbang Pengaman</li> <li>19. CCTV (Kamera pengaman)</li> <li>20. Pantry dan kelengkapannya</li> <li>21. Toilet</li> <li>22. Mushola</li> <li>23. AC (Pengatur suhu ruangan)</li> <li>24. Pengatur kelembaban</li> <li>25. Perlengkapan disinfektan</li> <li>26. Book Sterilizer (Alat sterilisasi buku)</li> <li>27. Document Sterilizer (Alat sterilisasi dokumen)</li> </ol>
7.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui dan memahami Undang-undang Perpustakaan No. 43 Tahun 2007</li> <li>2. Mengetahui dan memahami Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>3. Mengetahui dan memahami Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik</li> <li>4. Mengetahui dan memahami Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>5. Mengetahui dan memahami Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus</li> <li>6. Mengetahui dan memahami Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 7496:2009 tentang Standar Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah</li> <li>7. Memiliki kemampuan manajemen layanan perpustakaan</li> <li>8. Memiliki kemampuan teknis pengelolaan dan layanan perpustakaan</li> <li>9. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem perpustakaan, dan</li> <li>10. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik</li> </ol>
8.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pustakawan</li> <li>2. Atasan Pustakawan (Es II yang membawahi Unit Perpustakaan)</li> <li>3. Koordinator Pustakawan</li> </ol>
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir keberatan baik secara online maupun langsung;</li> <li>2. Mengisi kritik dan saran di Buku Tamu perpustakaan ketika meninggalkan perpustakaan.</li> </ol>
10.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
11.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan referensi hukum dan konstitusi yang disediakan sesuai dengan kebutuhan</li> <li>2. Waktu layanan sesuai dengan target layanan yang sudah ditetapkan</li> <li>3. Seluruh layanan perpustakaan tidak dikenakan biaya</li> </ol>
12.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada gratifikasi</li> <li>2. Tidak ada pungutan</li> <li>3. Koleksi buku terpelihara dengan baik</li> <li>4. Barang yang dititipkan terawasi dengan baik</li> <li>5. Jaringan internet tanpa batas</li> <li>6. Jaringan internet yang disediakan memenuhi standar keamanan</li> </ol>
13.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan per triwulan secara berkala
14.	Masa berlaku izin	-
15.	Waktu pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin-Kamis: 08.00-16.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00)</li> <li>• Jumat: 08.00-16.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00)</li> </ul>

## **Profil Perpustakaan MKRI**

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah perpustakaan khusus yang mengoleksi informasi tentang hukum dan konstitusi serta informasi yang berkaitan dengannya seperti sosial politik, administrasi publik, ilmu pemerintahan, filsafat dan sejarah.

Dalam struktur organisasi, Perpustakaan MKRI berada dibawah Unit Eselon II Pusat penelitian pengkajian perkara dan pengelolaan perpustakaan yang bertugas memberikan dukungan referensi dalam penanganan perkara konstitusi baik berupa buku tercetak maupun elektronik.

Layanan yang diberikan secara *off-line* yaitu datang langsung ke perpustakaan juga secara *online* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi seperti penelusuran informasi, pemesanan buku dan layanan koleksi digital dan eBook.

Perpustakaan MKRI berada di tiga lokasi, untuk perpustakaan digital berada di Lantai 8 Gedung Satu MK, perpustakaan konvensional berteknologi berada di Lantai 3 Gedung dua MK, sedangkan perpustakaan khusus yang mendukung Rapat permusyawaratan hakim berada di lantai 16 Gedung satu MK.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270**

Nomor : B/7703/PW.11.01/4/2022  
Sifat : Penting  
Derajat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Permintaan Narasumber

April 2022

Kepada Yth.  
**PROF. DR. M. GUNTUR HAMZAH, S.H., M.H.**  
**SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**JAKARTA**

Berdasarkan Jadwal Acara Rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 yang telah ditetapkan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi DPR RI tanggal 14 Februari 2022 dan sesuai keputusan Rapat Intern Mahkamah Kehormatan Dewan tanggal 17 Maret 2022, bersama ini kami beritahukan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan akan mengadakan kegiatan paket meeting yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Rabu tanggal 11 s.d. 13 April 2022 bertempat di Wisma DPR RI Griya Sabha Kopo, Bogor, Jawa Barat.

Adapun kegiatan paket meeting tersebut adalah untuk mendapatkan masukan dan diskusi dengan mengusung tema "Konstitusionalitas Putusan Peradilan Etik"

Berkenaan dengan itu, kami mengharapkan Saudara untuk dapat menugaskan **Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D** menjadi **Narasumber** dalam kegiatan tersebut dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan covid-19.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



**IRMA ISKANDAR**  
PIMPINAN  
SEKRETARIS JENDERAL DPR RI,  
*Irma Iskandar*  
NIP. 19661114 199703 1 001

Tembusan:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korkesra;
2. Pimpinan Mahkamah Kehormatan DPR RI;
3. Plt. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI;
4. Plt. Kepala Biro Persidangan II Setjen DPR RI;

24 Juni 2022

Nomor : 018 / V / AMI-PJ / 2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Bimtek Penata Pameran

Kepada  
Yth. Kepala Museum  
Mahkamah Konstitusi  
di  
Jakarta

Sumber Daya Manusia yang bertugas di museum perlu mendapat perhatian dan peningkatan pengetahuannya sehingga mendukung peningkatan kualitas dan kinerja SDM Museum di DKI Jakarta, salah satunya dalam aspek Tata Pamer. Asosiasi Museum Indonesia (AMI) DKI Jakarta Paramita Jaya bersinergi dengan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan Bimbingan Teknis Penata Pameran. Mohon Bapak/Ibu untuk menunjuk salah satu staf nya yang bertugas untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud

**Peserta Bimtek ini akan mendapat prioritas untuk mengikuti sertifikasi LSP PI – BNSP di kesempatan kedepan.**

Mengingat pentingnya Bimbingan Teknis ini mohon konfirmasi kepesertaan dari Museum / instansi Bapak Ibu dapat dikirimkan ke :

- Dimas Ardi Nugroho [ardinugrohodimaz@gmail.com](mailto:ardinugrohodimaz@gmail.com)  
(085782145052)
- Nur Hidayati Fauziah [nurhidayatifauziah19@gmail.com](mailto:nurhidayatifauziah19@gmail.com)  
(087787163624)
- Adang Suryana [suryaadang3@gmail.com](mailto:suryaadang3@gmail.com) (081319381927)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua  
Asosiasi Museum Indonesia  
Paramita Jaya



**Yiyok T. Herlambang, SE,MM.**

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
2. Arsip

- ▶ DASHBOARD
- ▶ INTERAKSI MASYARAKAT
- ▶ HUBUNGI MK

Pertanyaan Sudah Di Jawab Total Record : 40

No	Tanggal	Penanya	Pertanyaan	Jawaban	Action
1	28-11-2021	adi jaya	Bisa kami Lihat Putusan Tentang Uji Material Pencabutan Hak Politik	<p>salam konstitusi!</p> <p>terimakasih atas pertanyaannya, namun isu konstitusional yang disebutkan tersebut tidak jelas, apakah yang dimaksud adalah pencabutan hak politik TNI/POLRI ataukah yang lain. selengkapnya penelusuran putusan dapat dicari pada kolom putusan pada website Mahkamah Konstitusi di MKRI.id</p> <p>demikian,</p> <p>Terimakasih</p>	  
2	27-11-2021	Dhias Purwa Kusuma	<p>Yth. Jajaran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mohon ijin untuk menanyakan, bagaimanakah pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dimana peraturanperaturan pelaksaan dari amant UU Cipta Kerja telah selesai disusun dan diundangkan. Apakah akan tetap berjalan sambil menunggu perbaikan UU Cipta Kerja, atau sepenuhnya ditangguhkan sampai dengan adanya kejelasan perbaikan UU Cipta Kerja. Mengingat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bukanlah materi yang tergugat dalam gugatan UU Cipta Kerja. Terima kasih, mohon klarifikasi</p>	<p>salam konstitusi,</p> <p>pengujian UU Cipta Kerja dengan Perkara Nomor 91 /PUU-XVIII/2020 dengan isu konstitusional uji formil atas UU Cipta Kerja dikabulkan oleh mahkamah dengan amar, UU Cipta dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan perbaikan selama 2 tahun.</p> <p>implikasi dengan adanya putusan tersebut adalah hingga dilaksanakan perbaikan terhadap tata cara penyusunan UU Cipta kerja untuk disesuaikan dengan UU 12/2011 maka substansi dari UU Cipta Kerja tersebut ditunda berlakunya. termasuk didalamnya substansi yang terkait dengan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang diatur dalam UU cipta kerja dan Peraturan pelaksana dibawah UU.</p> <p>dalam Putusan a quo padapertimbangan mahkamah nomor [3.20.5] dimana kebijakan strategis dan berdampak luas yang harus ditangguhkan termasuk didalamnya kebijakan-kebijakan serta peraturan pelaksana yang didasarkan pada UU Cipta Kerja diminta untuk ditangguhkan terlebih dahulu. serta peraturan pelaksana yang masih diamankan namun belum diundangkan maka ditunda keberlakuannya.</p> <p>demikian</p> <p>terimakasih</p>	  



- ▶ DASHBOARD
- ▶ INTERAKSI MASYARAKAT
- ▶ HUBUNGI MK

8	23-11-2021	Yahya	Jelaskanlah tata cara perubahan undangundang yang ditegaskan dalam pasal 39 undangundang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan singkat	Salam Konstitusi, mohon pertanyaan yang Saudara ajukan diperiksa kembali, Pasal 39 UUD 1945 tidak ditemukan. terimakasih	  
9	23-11-2021	Mano	Salam sejahtera,Boleh dibantu infonya terkait Judicial review Undang undang cipta kerja , sampai dimana ya perkembangannya	salam konstitusi terkait perkara yang saudara tanyakan, Pengujian UU Cipta kerja belum dilengkapi dengan nomor perkara yang jelas, mohon dilengkapi. namun untuk pelacakan proses perkara dapat dipantau melalui website mkri ataau menghubungi mkri pada no. 2352-9000. demikian, terimakasih	  
10	22-11-2021	Muhammad Ashari	Jika sebuah putusan telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Bagaimana akibat hukumnya sebuah putusan tersebut, jika berdampak kepada perubahan sebuah Peraturan Daerah atau Peraturan Pemerintah Bagaimana jika daerah belum dantidak menjalankan amanah dari Putusan Konstitusi yang merupakan Peradilan Konstitusional	salam konstitusi, terimakasih atas pertanyaan dari Bp. Muhammad Ashari, namun sayangnya tidak disebutkan dengan jelas putusan dimaksud. namun hakikat dari putusan MK bersifat Final and Binding dimana putusan tersebut tidak memiliki upaya hukum lain lagi dan dinyatakan mengikat sejak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan MK sebenarnya bertujuan agar produk hukum yakni Undang Undang tetap menjiwai Konstitusi dan tidak bertentangan dengan norma-norma dalam konstitusi tersebut. sehingga melihat pada hierarki peraturan perundang-undangan untuk tetap selaras dan senada dengan konstitusi, jika terdapat norma dari suatu Undang-undang yang telah dinyatakan inkonstitusional maka seharusnya peraturan dibawahnya turut menyesuaikan. hal tersebut bertujuan jiwa konstitusi tetap selaras pada setiap peraturan perundang-undangan. demikian, terimakasih	  

Groups

Direct Messages

Muhammad Reza Winat...

+ New Ticket

In: Mahkamah Konstitusi RI Search

All 40	Mine	Chats	Tickets	Any	Open	Updated On
	<b>SONY MUSTOFA</b> mrthe1patriotindonesia@gmail.com Offline Message	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		OPEN	11/Oct/2021 19:45
	<b>SONY MUSTOFA</b> mrthe1patriotindonesia@gmail.com Offline Message	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		OPEN	11/Oct/2021 18:51
	<b>SONY MUSTOFA</b> mrthe1patriotindonesia@gmail.com Offline Message	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		OPEN	11/Oct/2021 18:51
	<b>Alfa Tini</b> alfatini@mail.ugm.ac.id Offline Message	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		OPEN	27/Sep/2021 11:05
	<b>Marthen Goo</b> marthen.goo.lawan@gmail.com Offline Message	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		OPEN	24/Sep/2021 16:44
	<b>Terry Fiviyane</b> fiviyane08@gmail.com Offline Message	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		OPEN	20/Sep/2021 17:40
	<b>Terry Fiviyane</b> fiviyane08@gmail.com Offline Message	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		OPEN	20/Sep/2021 17:40
	<b>Terry Fiviyane</b> fiviyane08@gmail.com Offline Message	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		OPEN	20/Sep/2021 17:40
	<b>jamaludin s</b> jamaludinsalam11@gmail.com Offline Message	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		OPEN	20/Sep/2021 15:34
	<b>Galang Bagus</b> galangbagusdy@gmail.com Offline Message	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		OPEN	18/Sep/2021 11:36
	<b>Ridho Hadi Nurriszky</b> ridhohadi771@gmail.com Offline Message	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		OPEN	07/Sep/2021 21:18
	<b>Bambang Suhermanto</b> bambang.shm84@gmail.com Offline Message	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		OPEN	02/Sep/2021 19:46

Groups Direct Messages

Muhammad Reza Winat...

+ New Ticket

In: Mahkamah Konstitusi RI Search

#6 : RE : Chat with alih budhi k

- Winda changed the assignee to Winda 30/Aug/2021 11:54
- Winda changed the status to 'Pending' 30/Aug/2021 11:54
- Winda changed the status to 'Open' 30/Aug/2021 11:55
- Winda 30/Aug/2021 11:55  
Salam Konstitusi. Saudara Alih Budhi K hendak menanyakan gugatan ke Mahkamah terkait perkara yang diajukan MK kurang jelas. MK memiliki 4 Kewenangan (pengu...
- Winda changed the status to 'Pending' 30/Aug/2021 11:55  
Seen by Winda
- Winda changed the status to 'Open' 30/Aug/2021 11:55
- Winda 30/Aug/2021 11:55  
Salam Konstitusi. Saudara Alih Budhi K hendak menanyakan gugatan ke Mahkamah terkait perkara yang diajukan MK kurang jelas. MK memiliki 4 Kewenangan (pengujian UU terhadap UUD 1945, SKLN, memutus pembubaran partai politik, dan PPHU) dan 1 Kewajiban (impeachment) berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan UU MK. Yang sebaiknya diperhatikan adalah sekurang-kurangnya legal standing/kedudukan hukum Pemohon, kerugian Konstitusional yang diuraikan dalam sistematika permohonan (jika permohonan pengujian UU), sistematika pengajuan secara tertulis dan alat bukti memenuhi syarat yang ditentukan oleh UU MK dan PMK. Untuk kurang jelasnya, pertanyaan saudara maka yang dapat kami jawab adalah untuk pengujian UU dapat melihat PMK Nomor 2 Tahun 2021, untuk PPHU dapat dilihat pada PMK Nomor 6, 7, dan 8 Tahun 2020. Berikut kami lampirkan akses menuju Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terkait ketentuan hukum beracara di Mahkamah : <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Regulation&id=3&pages=1&menu=6&status=2> Semoga jawaban kami dapat membantu. Salam sehat

Chat Transcript : Click to view

Name : alih budhi k

Email : alihbudhi11@gmail.com

Created On : August 30 2021, 11:54

Created By : Winda

Status : Pending

Priority : Medium

Assignee : Winda

Message Note

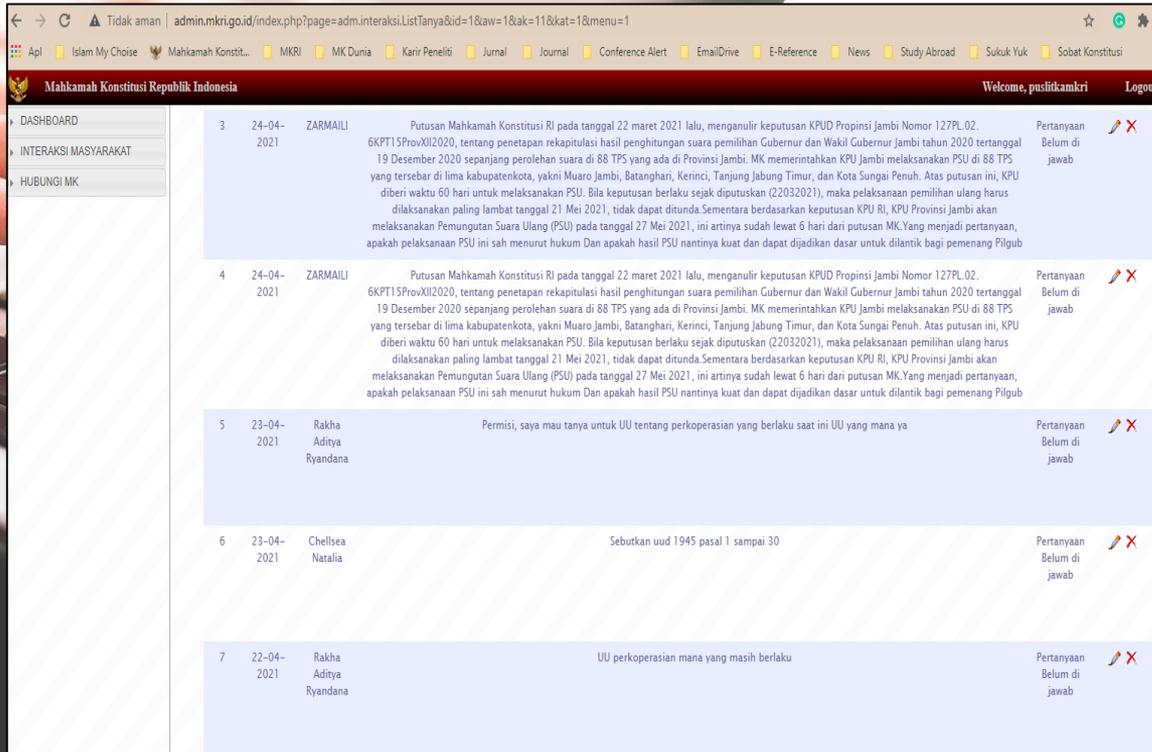
Type here...

Close Send

A close-up photograph of a person's hands with red nail polish typing on a silver laptop keyboard. The person is wearing a light blue shirt and a patterned sweater. The background is softly blurred.

# **Pengembangan Tanya-Jawab di Website Mahkamah Konstitusi**

# Tanya Jawab MK



The screenshot shows the website interface for the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. The page displays a list of questions and answers related to the Mahkamah Konstitusi (MK) process. The questions are numbered 3, 4, 5, 6, and 7, and are dated from 2021. The questions are related to the Mahkamah Konstitusi's decision on the 2020 general election results in Jambi and the implementation of the 1945 Constitution.

No	Tanggal	Nama	Pertanyaan	Status
3	24-04-2021	ZARMAILI	Putusan Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 22 maret 2021 lalu, menganulir keputusan KPUD Propinsi Jambi Nomor 127PL.02. 6KPT15ProvXII2020, tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 sepanjang perolehan suara di 88 TPS yang ada di Provinsi Jambi. MK memerintahkan KPU Jambi melaksanakan PSU di 88 TPS yang tersebar di lima kabupatenkota, yakni Muaro Jambi, Batanghari, Kerinci, Tanjung Jabung Timur, dan Kota Sungai Penuh. Atas putusan ini, KPU diberi waktu 60 hari untuk melaksanakan PSU. Bila keputusan berlaku sejak diputuskan (22032021), maka pelaksanaan pemilihan ulang harus dilaksanakan paling lambat tanggal 21 Mei 2021, tidak dapat ditunda.Sementara berdasarkan keputusan KPU RI, KPU Provinsi Jambi akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 Mei 2021, ini artinya sudah lewat 6 hari dari putusan MK.Yang menjadi pertanyaan, apakah pelaksanaan PSU ini sah menurut hukum Dan apakah hasil PSU nantinya kuat dan dapat dijadikan dasar untuk dilantik bagi pemenang Pilgub	Pertanyaan Belum di jawab
4	24-04-2021	ZARMAILI	Putusan Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 22 maret 2021 lalu, menganulir keputusan KPUD Propinsi Jambi Nomor 127PL.02. 6KPT15ProvXII2020, tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 sepanjang perolehan suara di 88 TPS yang ada di Provinsi Jambi. MK memerintahkan KPU Jambi melaksanakan PSU di 88 TPS yang tersebar di lima kabupatenkota, yakni Muaro Jambi, Batanghari, Kerinci, Tanjung Jabung Timur, dan Kota Sungai Penuh. Atas putusan ini, KPU diberi waktu 60 hari untuk melaksanakan PSU. Bila keputusan berlaku sejak diputuskan (22032021), maka pelaksanaan pemilihan ulang harus dilaksanakan paling lambat tanggal 21 Mei 2021, tidak dapat ditunda.Sementara berdasarkan keputusan KPU RI, KPU Provinsi Jambi akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 Mei 2021, ini artinya sudah lewat 6 hari dari putusan MK.Yang menjadi pertanyaan, apakah pelaksanaan PSU ini sah menurut hukum Dan apakah hasil PSU nantinya kuat dan dapat dijadikan dasar untuk dilantik bagi pemenang Pilgub	Pertanyaan Belum di jawab
5	23-04-2021	Rakha Aditya Ryandana	Permis, saya mau tanya untuk UU tentang perkoperasian yang berlaku saat ini UU yang mana ya	Pertanyaan Belum di jawab
6	23-04-2021	Chelsea Natalia	Sebutkan uud 1945 pasal 1 sampai 30	Pertanyaan Belum di jawab
7	22-04-2021	Rakha Aditya Ryandana	UU perkoperasian mana yang masih berlaku	Pertanyaan Belum di jawab

**Tanya Jawab MK merupakan salah satu media di website mkri.id sebagai sarana masyarakat mendapatkan informasi melalui pertanyaan kepada MKRI dalam rangka melaksanakan Misi MK “Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara”**

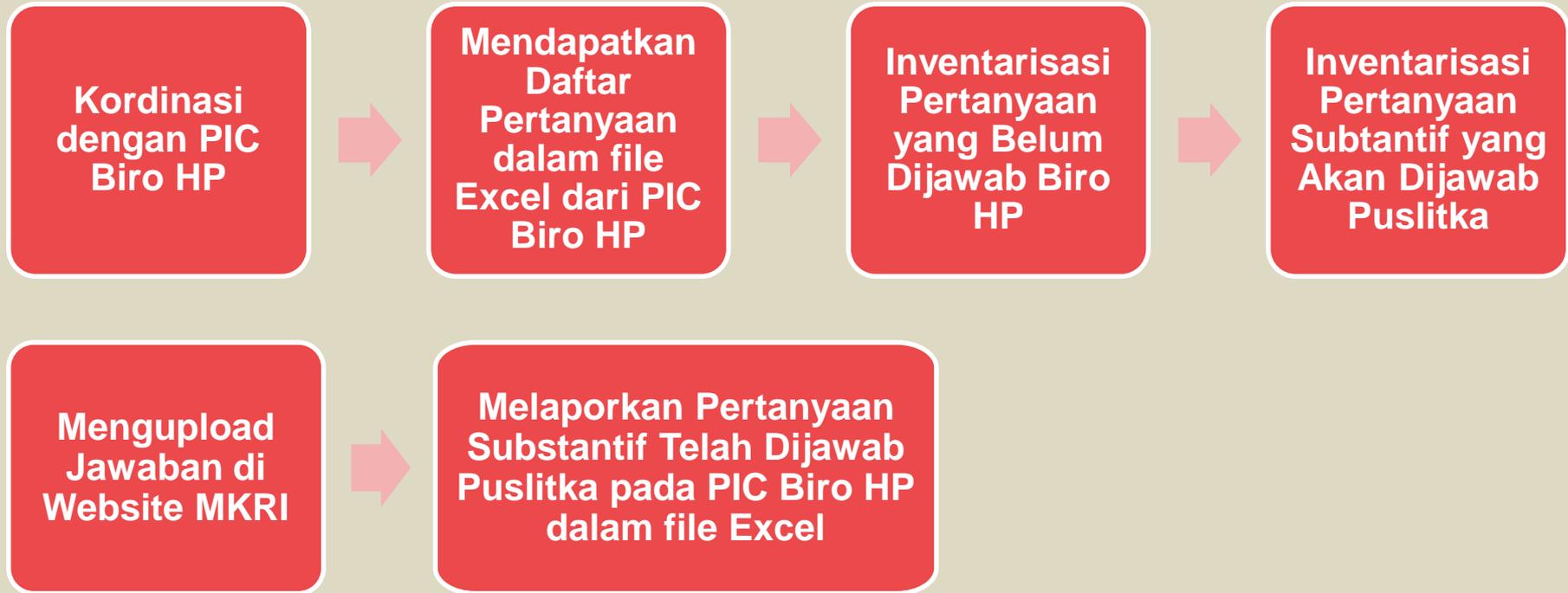
# Unit Kerja Terkait



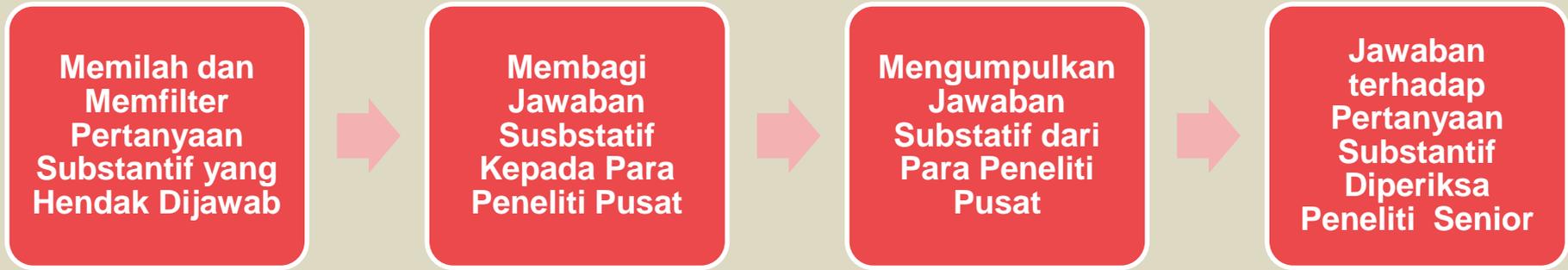
## PIC: Biro Humas dan Protokol

No.	Jenis Pertanyaan	Unit Penjawab	PIC
1.	<b>Pertanyaan Administratif</b> : Magang, Organsiasi, Wawancara, dll	Biro SDMO	Ariesty
2.	<b>Perkembangan Perkara</b> : Putusan, Persidangan, Risalah, dll	Biro HAK	
3	<b>Pendidikan/ Pelatihan</b> : Prosedur, Jadwal, Materi Bimtek, dll	Pusdik	
4.	<b>Substantif Normatif</b> : Analisis PerUUan, Putusan, Konsep & Teori Hukum, Masalah Hukum, dll	Puslitka	M. Reza W.

# Praktik Alur Menjawab Pertanyaan



# Praktik Alur Menjawab Pertanyaan di Internal Puslitka



- **Pertanyaan Substantif Normatif (Perundang-Undangan & Putusan) → Dapat dijawab**
- **Pertanyaan Substantif Opini (Teori dan Konsep Hukum) → Dapat dijawab**
- **Pertanyaan Substantif Kasus Kongkrit Hukum → Tidak dapat dijawab (Darahkan konsultasi ke PH)**
- **Pertanyaan Substantif Diluar Kewenangan MK → Tidak dapat dijawab (Darahkan diskusi ke Akademisi)**
- **Pertanyaan Tidak Jelas → Tidak dijawab (Dapat ditanyakan ulang maksud pertanyaannya)**

# Kendala / Permasalahan

1. Pembagian pertanyaan kepada Biro/Pusat masih manual
2. Belum adanya kategorisasi pertanyaan secara otomatis
3. Belum ada format jawaban yang disepakati
4. Mekanisme pengawasan kualitas jawaban pertanyaan
5. Terdapat pertanyaan berulang dan belum ada template jawaban untuk pertanyaan yang sama
6. Belum adanya pemetaan/data statistic jenis pertanyaan untuk mengetahui pertanyaan yang sering ditanyakan (FAQ)



# Rekomendasi Pengembangan Tanya Jawab

1. Perlu pengembangan aplikasi Tanya Jawab agar Biro HP punya opsi untuk langsung menentukan pertanyaan dijawab Biro/Pusat yang mana
2. Perlu pengembangan aplikasi untuk langsung otomatis mengkategorisasi pertanyaan ketika penanya memasukan pertanyaannya di Website
3. Perlu kesepakatan format jawaban antara Biro/Pusat terkait dalam menjawab
4. Perlu dibentuk / ditunjuk mekanisme pengawasan jawaban untuk menjamin kualitas jawaban terhadap pertanyaan
5. Kedepannya perlu dikembangkan kanal khusus seperti “Klinik Hukumonline”, sehingga cukup memberikan link untuk menjawab pertanyaan berulang.
6. Perlu diklasifikasikan pertanyaan yang sering ditanyakan dan dibuat (*Frequently asked Question/FAQ*). Bisa dikembangkan robo-answer/penjawab otomatis agar dapat menjawab pertanyaan FAQ secara otomatis

## KATALOG ONLINE

<https://simpus.mkri.id/opac/pencariansederhana?action=pencarianSederhana&katakunci=&ruas=Judul&bahan=Semua+Jenis+Bahan>

Online Public Access Catalog  
Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

Sabtu, 25 Februari 2023, 11:49:22

Tampilkan Login

Cari Browse

Kata Kunci Judul Semua Bahan Cari

Pencarian lanjut • Riwayat Pencarian • Bantuan

Home > Pencarian Sederhana >

Menampilkan 1 - 10 dari 10910 hasil (2.3416969776154 detik)

Pilih semua

1   **100 Great business ideas: side-ide unik dibalik sukses bisnis miliaran dolar / Emily Ross**

Jenis Bahan Monograf  
Pengarang Ross, Emily  
Angus Holland  
Penerbitan Jakarta : Andi, 2009  
Konten Digital Tidak Ada Data  
Ketersediaan 3 dari 3 eksemplar  
Nomor Panggil 338.7 ROS 4  
Artikel Tidak ada data

2   **Ensiklopedi Hukum Pidana Islam vol I-V**

Jenis Bahan Monograf  
Pengarang Abdul Qadir Audah

Lebih Spesifik :

Pengarang	
Edited	139
Sekretariat Negara Republik Indonesia	121
Redaksi Sinar GrafiKa	89
Jimly Asshiddiqie	59
Edited by Elihu Lauterpacht	43
International	33
Gunawan Widjaja	25
Adrian Sutedi	26

## KUNJUNGAN PUSKON



Peserta melakukan studi ekskursi ke Pusat Sejarah Konstitusi yang berada di gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

## Bimbingan dan konsultasi Magang



Layanan Ruang Diskusi



Layanan digital Perpustakaan

